

25 Tahun Tak Sumbang PAD

# Gubernur Segera Revitalisasi Perusda

PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng Longki Djanggola, akan merevitalisasi Perusahaan Daerah (Perusda) Sulteng yang dianggap keberadaannya selama 25 tahun, belum ada kontribusi riil terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Sulteng.

“Perusda bahkan belum memiliki holding dalam menjalankan fungsinya. Namun, untuk merubah struktur Perusda harus dilakukan revisi dulu pada Perda yang mengatur Perusda ini, baru kemudian dilakukan perubahan besar-besaran,” kata Longki Djanggola saat memberikan sambutan pada Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sulteng, di Swiss belHotel,

Jumat (16/9) malam.

Upaya revitalisasi tersebut, menyusul respon positif Gubernur terhadap kritikan dan usulan yang dilontarkan pihak Kamar Dagang Industri (Kadin) Sulteng pada Rapimprov Kadin Sulteng atas kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) Sulteng, yang dinilai tidak memiliki kontribusi terhadap pendapat asli daerah (PAD) Sulteng selama ini.



GUBERNUR Sulteng Longki Djanggola bersama Ketua Kadin Sulteng Arus Abdul Karim didampingi Wakil Ketua Kadin Indonesia Natsir Mansyur melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kadin Sulteng dan Pemprov Sulteng tentang Pengelolaan Agri Bisnis dan Kelautan. FOTO: AFIT/MS

Menurut Ketua Kadin Sulteng, Arus Abdul Karim, kritik yang dilontarkan pihaknya terhadap Perusda Sulteng tersebut, juga berdasarkan sumbangsih pemikiran pengurus Kadin.

“Kondisi Perusda Sulteng menurut pengamatan kami tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 25 tahun. Ini harus menjadi perhatian Gubernur Sulteng, diantaranya dengan melakukan revitalisasi terhadap Perusda,” imbuh Arus Abdul Karim.

Revitalisasi terhadap Perusda, saran Arus harus dimulai dengan pembenahan terhadap empat poin

## Hari Ini, Kadin Panel Diskusi Ekonomi

### • REVITALISASI

penting. Pertama katanya, pembenahan pada struktur permodalan yang diberikan terhadap Perusda. Kedua, model badan usaha dan organisasi pengelola, ketiga, jenis kegiatan usaha, dan terakhir hubungan korporasi dengan Legislatif. "Tanpa rumusan yang profesional berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik terhadap keempat hal tersebut, sama saja dengan membiarkan keberadaan Perusda saat ini, seperti kondisi 25 tahun sebelumnya," terangnya.

Dalam kegiatan Rapimprov Kadin Sulteng tadi malam, juga dilakukan penandatanganan MoU antara pemerintah Sulteng dan Kadin tentang pengelolaan agribisnis dan kelautan. Penandatanganan MoU ini juga melibatkan Wakil Ketua Kadin Pusat, Natsir Mansyur.

Menurut rencana, hari ini (17/9), akan dilangsungkan panel diskusi dengan agenda membahas percepatan perluasan pembangunan ekonomi Sulteng selama lima tahun. Panel diskusi ini rencananya akan diikuti oleh Gubernur Longki Djanggalola, Ketua DPRD Provinsi Sulteng, Pimpinan KBI Palu, dan kisah sukses Murad Husein.

Sebelumnya, Perusda Sulteng belum mampu menjadi ujung tombak peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu terlihat dari besaran PAD yang disumbangkan perusahaan plat merah itu lima tahun terakhir. Padahal penyertaan modal dari APBD cukup besar.

Hingga tahun 2009, anggaran penyertaan modal yang dikucurkan ke Perusda Sulteng mencapai Rp8,28 miliar, namun penerimaan Perusda yang disetor ke pemerintah Triwulan II TA 2010, baru mencapai Rp86,3 juta. Malah dua bulan terakhir di tahun 2010, Perusda kewalahan membayar upah karyawannya.

Menurut data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur HB Paliudju akhir masa jabatan 2006-2010, sejak

tahun 2006, Perusda tidak memberikan kontribusi banyak bagi daerah. Jumlah keuntungan yang disetor ke daerah tahun 2006 sebanyak Rp26,5 juta, tahun 2007 Rp103,9 juta, tahun 2008 tidak ada, tahun 2009 Rp585,6 juta dan Triwulan II tahun 2010 sebanyak Rp86,3 juta.

Apa yang dicapai Perusda sangat jauh berbeda dengan PT Bank Sulteng, yang juga merupakan BUMD. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2010, Bank Sulteng telah memperoleh penyertaan modal dari Pemprov sebesar Rp61,4 miliar. Dari penyertaan modal ini, Bank Sulteng mampu menyumbang PAD sebesar Rp1,3 miliar (2006), Rp3,8 miliar (2007), Rp4,1 miliar (2008), Rp6,9 miliar (2009) dan Rp12,7 miliar (Hingga TW II 2010).

Melihat kondisi Perusda seperti itu, anggota Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, As'ad Lawali menyarankan perlunya optimalisasi kinerja di jajaran manajemen Perusda Sulteng. Modal yang dikucurkan pemerintah setiap tahun, semestinya mampu diputar dan dioperasikan sehingga mendatangkan keuntungan dan dapat membiayai operasional perusahaan. Atas kondisi perusahaan yang tidak mampu membayar gaji karyawannya, As'ad mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi manajemen pada perusahaan tersebut.

"Perusda daerah Sulteng merupakan salah satu yang diharapkan mampu menyumbang pendapatan daerah (PAD). Jika kondisinya tidak mampu membayar gaji karyawan, bagaimana bisa meraup untung. Ini yang menurut saya perlu dievaluasi dan dibenahi," saran As'ad beberapa waktu lalu.

### SULIT BERKEMBANG

Direktur Utama Perusda Sulteng, Zaenal Abduh mengaku, pihaknya sulit untuk menjadi penyangga PAD. Alasannya, sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 ini, Perusda Sulteng tak mendapat suntikan penyertaan modal dari APBD. Di kantornya, Zaenal

sambungan dari hal. 1

mengaku, pihaknya selalu mengusulkan adanya biaya penyertaan modal kepada Deprov, namun selalu dicoret dengan alasan masih akan dipertimbangkan. "Tahun ini kami ajukan Rp1,5 miliar untuk penyelesaian bangunan bengkel, tapi dicoret. Alasannya saya tidak tahu," kata Zaenal pada suatu kesempatan.

Mantan anggota Deprov ini mengaku dilematis. Pasalnya di satu sisi, perusahaan milik daerah ini harus terus beroperasi dan harus menghidupi 32 karyawan. Karena tak ada biaya operasional, ia mengaku gaji karyawan sering terlambat dibayar setelah menunggu pekerjaan selesai. "Saya saja sudah empat bulan tidak terima gaji," jelasnya.

Karena ketiadaan modal, Perusda, kata dia tidak bisa dikatakan mengalami untung atau rugi. Akibatnya, juga tidak ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena penyertaan modal dari APBD nihil. Menurut Zaenal, setiap bulan pihaknya harus mengeluarkan biaya operasional sebesar Rp80 juta untuk tunggakan listrik, air dan telepon, membayar gaji karyawan dan mencicil pelunasan utang-utang pihak ketika yang ditinggalkan Wildan Abdul Malik.

Apakah tidak berfikir mendapat modal dari agunan perusahaan? Zaenal mengaku sudah pernah mengusulkannya ke gubernur, namun belum mendapat persetujuan hingga kini.

Zaenal juga membenarkan LKPj akhir Gubernur Paliudju, yang menyebut sumbangan PAD dari Perusda pada tahun 2010 mencapai 86.358.627,57. Menurut Zaenal, sumbangan tersebut merupakan 35 persen dari keuntungan tahun 2009. Sementara keuntungan tahun 2010, untuk diserahkan 2011, mengalami defisit. Dalam laporannya keuangannya, travel saja ia mengaku rugi Rp2 juta. "Saya sudah tiga kali mengundurkan diri, saya bingung. Kalau memang perusahaan ini tidak mau jalan, tutup saja," ujarnya. ■